

# Keberatan Perwako RT/RW, Gugat ke PTUN

ADIANSYAH-RENGGA YULI-ANDRA, Batamkota

WALI Kota Batam Muhammad Rudi memastikan tidak akan mencabut Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 28 Tahun 2017 yang melarang perangkat RT/RW terlibat politik. Ia manantang, jika ada pihak yang keberatan agar mengajukan keberatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Ada yang keberatan, gugat, biar pengadilan yang jawab," kata Rudi di Pulau Buluh, Kecamatan Bulan, Rabu (28/2). Ia menyampaikan, apapun hasil keputusan pengadilan akan dilaksanakan. "Kalau itu dibatalkan, saya laksanakan (putusan pengadilan)," ucapnya.

Ia menyampaikan, sejatinya Perwako tersebut sudah ada sejak dirinya belum menjabat sebagai Wali Kota Batam. Ia hanya meneruskan aturan pemimpin sebelumnya.

Lalu bagaimana tanggapannya terkait Perwako untuk kepentingan politik kepala daerah, ia justru mempertanyakan pihak-pihak tertentu yang memprotes Perwako tersebut. Menurutnya, mereka yang protes justru dari oknum-oknum yang akan maju dalam pemilihan tertentu. "Saya tanya balik, kalau enggan berhenti jadi RT/RW, apa takut kalah," ucapnya.

Menurut Rudi, beberapa perangkat RT/RW yang masa jabatannya habis memang diambil alih pemerintah

hingga ada pemilihan baru. Ia justru mempertanyakan kenapa baru-baru ini aturan RT/RW itu baru diributkan. "Apalah jadi RW saja jadi ribut. Ini sudah ada dari zaman Wali Kota sebelumnya," kata Rudi lagi.

Dari gedung DPRD diperoleh informasi bahwa anggota dewan akan meminta penjelasan Perwako itu kepada Pemko Batam. "Kita bisa saja memanggil. Namun tentu dibicarakan dulu, apakah nanti cukup dari Komisi I saja atau pimpinan langsung yang memanggil. Berhubung Ketua DPRD lagi di Jakarta, makanya kita tunda dulu," kata Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto, Rabu (28/2).

Menurut dia, polemik Per-

wako 28 Tahun 2017 ini sudah lama mencuat menjadi problem di masyarakat. Sebab, selain keresahan di masyarakat, khususnya perangkat RT/RW yang terlibat partai politik, juga mengenai dasar aturan perwako ini. Mengingat, tak ada larangan di Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 yang mengatur perangkat RT/RW berpolitik. "Kalau dibilang jangan mencampuradukkan dengan politik. Memang semua ini hasil dari politik. Makanya ini perlu kita minta diperjelas," tuturnya.

Bahkan sebelum adanya rencana pemanggilan ini, lanjut Budi, pihaknya jauh hari sudah merencanakan. Sebab, dari informasi di lapangan, ada ASN yang senga-

ja mengajak perangkat RT dan RW ke partai tertentu. Pengkondisian ini diduga dilakukan di tingkat paling rendah, yakni setingkat RT.

Ironisnya lagi, kata Budi, lurah dan camat yang seharusnya netral juga sudah masuk di dalamnya dan sudah sampai mengarahkan kepada partai tertentu. "Ini kondisi yang kita terima dari masyarakat," tegas Budi.

Politisi PDIP itu mengaku sepakat dengan perwako ini. Asalkan bisa dibuat netral. "Artinya pemerintah harus konsisten. Kalau dilarang, semuanya dilarang. Kalau terbukti beri tindakan tegas," usulnya.

Anggota Komisi III DPRD Batam Rohaizat yang juga

ketua RW 07 Tanjunguma menambahkan, yang perlu dikhawatirkan itu kenetralan ASN, bukan perangkat RT/RW. Sebab, kata dia, ada beberapa laporan masyarakat menyebutkan ASN diam-diam berafiliasi ke politik praktis ataupun mendukung calon-calon tertentu. "Harusnya ini, apalagi tahun politik seperti ini," ucapnya.

Ia mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN secara tegas menyampaikan jika PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat.

"Bukan mengejar RT/RW-nya. Mereka kan bukan sebuah institusi atau lembaga



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

Muhammad Rudi

yang terikat aturan larangan terlibat dalam pemilu. Mereka tokoh masyarakat yang tugas fungsinya sebagai kepala lingkungan," papar politisi PKS itu.\*\*\*

# Tarif Pajak Resmi Naik



**ADIANSYAH-ALFIAN LUMBAN GAOL,**  
Batamkota

**P**emerintah Kota (Pemko) Batam memastikan mulai hari ini, Rabu (1/3) resmi menerapkan tarif pajak daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

“Mulai diterapkan (awal Maret), karena Februari batas waktu terakhir (penundaan). Jadi, kalau tidak ada perubahan ya tetap jalan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah, Selasa (28/2).

Raja menuturkan, penerapan tarif pajak baru tersebut semat-mata menjalankan perda yang merupakan produk bersama DPRD Batam dan Pemko Batam. Sebab, sesuai aturan atau kebijakan bahwa batas penundaan berakhir pada akhir Februari. “Jadi 1 Maret sudah harus diterapkan,” tegasnya.

Apakah ada kemungkinan penundaan di tengah jalan apabila ada pihak yang keberatan? Ia mengatakan untuk saat ini pemerintah tetap komit pemberlakuan tarif pajak baru ini. Apalagi hingga kini belum ada pihak yang secara resmi menyampaikan keberatan ke Pemko Batam. “Kami akan ikuti arahan lebih lanjut seandainya nanti ada kebijakan baru lagi,” imbuhnya.

Namun, Raja juga mengaku heran dengan pihak-pihak yang mengklaim belum menerima informasi terkait tarif pajak baru ini, sehingga tidak mengajukan keberatan. Padahal, lanjut Raja,



# Tarif Pajak Resmi Naik

*Sambungan dari hal 9*

perda tersebut pembahasannya lama dan melibatkan berbagai unsur terkait. "Perda ini sudah dua tahunan. Dulu juga menunggu persetujuan pusat, sekitar satu tahunan," paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, hingga kemarin belum ada pihak yang menyampaikan keberatan secara resmi ke Pemko Batam terkait kenaikan sejumlah sektor pajak tersebut. Untuk itu, tidak ada pembahasan yang dapat menghasilkan aturan baru. "Sebelum ada aturan untuk dibatalkan atau ditunda, jalan terus," tegasnya.

Menurutnya, jika DPRD Batam merestui penundaan sudah pasti Pemko Batam akan menunda kenaikan pajak ini. "Intinya yang penting ada aturan yang mengatur, di mana pembahasannya harus kami (*Permko Batam*) dan DPRD Batam," jelasnya.

**Banyak THM Terancam  
Tutup**

Kondisi Tempat Hiburan Malam (THM) di Batam kian memprihatinkan. Bahkan akan banyak tempat hiburan yang terancam tutup, akibat kenaikan tarif pajak menyusul penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

"Kondisi ekonomi di Batam saat ini belum membaik. Tempat-tempat hiburan salah satu yang terdampak, di mana-mana sepi sekarang," kata Ketua Asosiasi Jasa Hiburan (Ajahib) Kota Batam Gembira Ginting, kemarin.

Ia menuturkan, saat ini pengusaha jasa hiburan malam kesulitan untuk menggaji karyawan. Bahkan beberapa tempat hiburan malam sudah tutup dan ada beberapa yang mau tutup. "Lihat saja Diskotek Pacific saja sudah tutup. Kondisi sekarang ini memang sudah sangat berat," ungkapnya.

Menurut Gembira, harusnya pihak terkait, Pemko dan DPRD bisa memahami kondisi saat ini. Duduk bersama membicarakan hal ini, termasuk membicarakan kenaikan pajak yang ditetapkan Pemko

Batam. "DPRD dan Pemko Batam harusnya mengundang kita untuk membicarakan masalah ini," ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Tumbur Sihalohe mengatakan, pemerintah dan semua pihak terkait harus bisa menjaga iklim investasi di Batam. Menurutnya, tempat hiburan malam adalah sarana pendukung pengembangan pariwisata di Batam.

"Apapun ceritanya jika tempat hiburan banyak yang tutup, itu pasti berdampak sama pariwisata kita. Jadi tugas kita bersama untuk menciptakan investasi ini terus tumbuh. Bukan malah membuatnya semakin memprihatinkan," katanya.

Menurut Tumbur, sepihnya tempat hiburan saat ini harus didukung dengan kebijakan yang proinvestasi. Bukan malah membebani dengan kebijakan kenaikan pajak yang cukup tinggi. "Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kebijakan terkait pajak ini harus ditunda dulu. Jangan dulu dipersulit. Apalagi dengan kondisi perekonomian saat ini," terangnya.\*\*\*



# Puluhan Kios Gang Merdu Dibongkar Maret

## Pedagang Diminta Mengosongkan, Bukan Membongkar

BATAMKOTA (BP) - Puluhan kios di Jalan Gang Merdu atau tepatnya depan bangunan My Mart Batamcenter akan dibongkar Maret mendatang. Pedagang hanya diminta untuk mengosongkan kios, karena kios itu merupakan milik Pemko Batam.

Pantauan Batam Pos, beberapa kios sudah nampak kosong atau tak pernah buka lagi sejak seminggu terakhir. Bahkan beberapa kios terlihat sudah kosong dan terbongkar.

Ujang, salah satu pedagang mengaku sudah mendapat surat pemberitahuan agar mengosongkan kios tersebut. Hal itu dikarenakan kios-kios itu akan ditertibkan. Namun, secara pribadi ia mengaku berat karena belum ada tempat usaha yang baru.

"Saya ngikut saja, tapi sam-

pai sekarang masih banyak yang buka. Makanya saya masih tetap buka. Pindah pun masih bingung kemana, masih cari tempat," terangnya.

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batam Imam Tohari mengatakan, pedagang di kawasan Gang Merdu sudah mendapat surat peringatan (SP) 3. Dimana pedagang, hanya diminta mengosongkan kios-kios tersebut, bukan membongkar.

"Kami minta mengosongkan kios tersebut, bukan membongkar. Sebab kios-kios itu merupakan aset Pemko Batam," terang Imam, kemarin.

Menurutnya, ada beberapa pedagang yang telah mengosongkan kios, bahkan membongkar kios tersebut. Padahal secara aturan, kios-kios itu tak boleh dibongkar.

"Kalau yang membongkar, nanti kami cari. Karena memang tak boleh. Yang dibongkar itu aset Pemko," tegas Imam.

Disinggung jadwal pasti di pembongkaran kios, Imam mengaku tidak tahu. Sebab teknis jadwal pembongkaran harus berkoordinasi dengan tim terpadu lainnya.

"Nah, untuk tanggal belum tahu, entah awal Maret atau pertengahan Maret. Yang jelas akan ditertibkan bulan Maret," pungkas Imam.

Diketahui jalan depan bekas Mymart atau Gang Merdu itu kerap menimbulkan macet. Hal pertama disebabkan kendaraan mulai roda dua hingga empat yang parkir di bahu jalan. Padahal jalan tersebut berdekatan dengan *traffic light.*(she)



# Gudang Bahan Pangan Jangan Sekadar Wacana

**BATAMKOTA (BP)** - Status Batam yang bukan daerah penghasil bahan pokok kerap dituding sebagai biang harga pangan tak stabil. Pemerintah Kota (Pemko) Batam pun mulai berpikir agar bahan pangan, terutama kebutuhan pokok, selalu tersedia. Caranya dengan membuat gudang penyimpanan.

"Kita dukung Batam memiliki gudang penyimpanan. Hanya saja, sampai saat ini dinas terkait tidak pernah mengusulkan untuk pengadaannya di DPRD Batam," kata anggota Komisi II DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging, Rabu (28/2).

Menurut Uba, rencana ini sebenarnya baru disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mardanis di media. Sementara hal ini belum pernah diutarakan di Komisi II. Bagaimana teknis kelola nantinya juga belum pernah dijabarkan. "Bagaimana mau dianggarkan, kalau ini belum diusulkan," lanjutnya.

Diakui Uba, teknis kelola gudang penyimpanan ini sangat penting dijabarkan. Apakah nantinya dikelola DKPP, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Selain itu, jika pengadaan gudang ini disetujui, pengelolaan aset pun harus jelas. "Intinya kita mendukung. karena bagaimanapun ini menyangkut publik dalam menstabilkan harga di pasaran," tuturnya.

"Jangan nanti DKPP yang mengusulkan wacana ini, tapi saat pembahasan dia pula tak datang, dan ini selalu terjadi," sambung Uba.

Untuk pengadaan sendiri, kata Uba, bisa saja dimasukkan di pembahasan APBD perubahan 2018 ini. Tentu saja dengan catatan, pengadaan dibahas sebelum APBD perubahan disahkan. "Artinya, programnya mulai sekarang sudah diusulkan, sehingga bisa kita bahas beresam-sama," jelas Uba.

Sebelumnya Kepala DKPP Batam Mardanis menyampaikan bahwa Batam sejatinya butuh pengadaan cool storage (gudang) agar stok bahan pokok yang didatangkan dari daerah lain dapat bertahan lama. Dengan adanya gudang yang diprediksi menyerap dana Rp 5 miliar ini, dinilai dapat membuat cadangan bahan pokok bertahan hingga enam bulan.

"Misalnya lebaran Juni, kita masukkan Maret. Kita keluarkan saat butuh, tahan lama. Jakarta kan begitu, makanya harganya stabil dan enggak langka," papar dia. (rng)



# 10 Ribu e-KTP Selesai Dicitak

Berikutnya, Disdukcapil Fokus di Batamkota

**BATUAJI (BP)** - Permasalahan menumpukan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Batam sedikit demi sedikit teratasi. Saat ini, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam telah selesai mencetak 10 ribu lebih e-KTP milik warga Kecamatan Batuaji.

"Sudah selesai. Ada 10 ribu e-KTP yang sudah selesai dicetak," sebut Kepala Disdukcapil Kota Batam Said Khaidar, Rabu (28/2).

Dia mengatakan, proses pencetakan ribuan e-KTP tersebut memakan waktu selama dua minggu. "Syukur, satu persatu masalah penumpukan terselesaikan," imbuhnya.

Untuk itu, ia mengimbau warga Batuaji untuk segera mengambil e-KTP. Hal itu untuk meminimalisir penumpukan yang ada di kantor

kecamatan. "Diimbau untuk segera ambil," ucapnya.

Saat ini, Disdukcapil juga tengah fokus menyelesaikan e-KTP untuk Kecamatan Batamkota. Ribuan berkas e-KTP siap cetak itu akan dikebut secepat mungkin agar permasalahan penumpukan e-KTP di kecamatan ini juga terselesaikan. "Kalau blangko lancar masalah e-KTP akan cepat selesai," jelasnya.

Sebelumnya, Disdukcapil juga sudah menyelesaikan permasalahan e-KTP di Kecamatan Nongsa dan hinterland. "Ada delapan ribu e-KTP yang telah dicetak di hinterland dan tujuh ribu e-KTP di Nongsa," sebutnya.

Sementara itu, untuk mempercepat proses pendistribusian e-KTP, Kecamatan Batuaji menyerahkan 2017 e-KTP yang telah di cetak kepada em-



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

**PEGAWAI Kecamatan Batamkota menyusun e-KTP yang sudah selesai dicetak, Jumat (23/2) lalu.**

pat kelurahan yang ada di wilayahnya. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Batuaji Safrianto mengatakan pendistribusian lewat kelurahan ini memudahkan warga untuk mengambil e-KTP milik mereka.

"Selain itu warga juga tidak harus jauh-jauh ke kantor kecamatan, mereka bisa lang-

ung hubungi kantor lurahnya," ujar Safrianto, belum lama ini.

Dia mengatakan selama ini angka pengambilan e-KTP di Kecamatan Batuaji sangat rendah. Maka untuk meminimalisir penumpukan e-KTP yang sudah dicetak, pihak kecamatan pun berinisiatif membagikan per kelurahan. (une)